

REFORMASI BIROKRASI DI KALURAHAN PANGGUNG HARJO

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah



disusun oleh:

**DANANG SEPTIYANTO
20610057**

**PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2022**

PENGESAHAN

TESIS

REFORMASI BIROKRASI DI KALURAHAN PANGGUNG HARJO

Disusun oleh:

DANANG SEPTIYANTO

Nomor Mahasiswa: 20610057

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal 8 Juni 2022

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)

Dr. Supardal

Penguji I

Dr. R. Widodo Triputro

Penguji II

Dr. Rijel Samaloisa

Yogyakarta, 8 Juni 2022

Mengetahui

**Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Dr. Supardal

P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Danang Septiyanto

N I M : 20610057

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul REFORMASI BIROKRASI DI KALURAHAN PANGGUNG HARJO, adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 6 April 2022
Yang membuat pernyataan

Danang Septiyanto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister (S-2) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan penelitian tesis dengan judul REFORMASI BIROKRASI DI KALURAHAN PANGGUNG HARJO tidak luput dari kekurangan, kesulitan, hambatan maupun rintangan, sehingga dalam penyusunan penelitian tesis ini penulis merasa masih jauh dari kata sempurna.

Terselesaikannya penyusunan penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan maupun saran-saran yang berguna dalam penyusunan penelitian tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Supardal, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pikiran dalam memberikan semangat, arahan dan bimbingan serta menguji tesis ini.
2. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, selaku dosen penguji I yang telah memberikan waktu dan pikiran serta arahan untuk menguji tesis ini.
3. Dr. Rijel Samaloisa, selaku dosen penguji II yang telah memberikan waktu dan pikiran serta arahan untuk menguji tesis ini.
4. Para dosen dan staff akademik Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta.

5. Pemerintah Kalurahan Panggunharjo yang telah memberi kesempatan dan menerima saya sebagai peneliti tesis ini.
6. Teman-teman Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Angkatan 26 atas pertemanan dan kerjasamanya selama ini.

Yogyakarta, 6 April 2016

Penulis,

Danang Septiyanto

MOTTO

*Education is the most powerful weapon which can you
use to change the world*

(Nelson Mandela)

*Learn from yesterday, Live for today, hope for
tomorrow*

(Albert Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Penyusunan Penelitian Tesis Ini Penulis
Persembahkan Untuk**

**Kedua Orang Tuaku
(Bpk. Suropto dan Ibu F. Suratinem)**

**Istriku
(Rokhayati)**

**Anakku
(Enggar Bagus Ing Praya)**

**Terimakasih atas doa, semangat serta kasih sayang
yang telah diberikan kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian
tesis ini.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Konseptual	9
1. Reformasi Birokrasi.....	9
2. Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	18
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Lokasi Penelitian	25
3. Subjek Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	29

BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN PANGGUNG HARJO

A. Sejarah Kalurahan	33
B. Wilayah	35
C. Kondisi Geografis.....	38
D. Kependudukan	40
E. Pemerintah Kalurahan Panggungharjo	45

BAB III ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DI KALURAHAN PANGGUNG HARJO

A. Implementasi Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggungharjo.....	50
1. Memperluas Pelayanan Publik dalam Rangka Mengubah Relasi antara Pemerintah Kalurahan dengan masyarakat.....	50
a) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kalurahan).....	56
b) Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS)	60
c) Lembaga Mediasi Kalurahan (LMK).....	64
d) Panggung Tanggap <i>Covid-19</i>	65
2. Pelayanan Administrasi Publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	70
3. Membangun Kultur Baru Birokrasi dengan memberikan <i>Reward and Punishment</i>	72
4. Keterbukaan Informasi Publik.....	78
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Kalurahan.....	80
B. Kendala yang Dihadapi dalam Melakukan Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggungharjo	81
1. Disiplin Kerja.....	82
2. Pola Pikir Perangkat Kalurahan yang Harus Dilayani.....	83
3. Kebijakan Reformasi Birokrasi yang Belum Didukung Regulasi.	84

C. Capaian Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggunharjo	86
1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan.....	86
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	88
3. Penghargaan dari Berbagai Pihak.....	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama Padukuhan Beserta Jumlah RT dan Luas Wilayah.....	38
Tabel 2.2	Kondisi Geograsi Kalurahan Panggunharjo	39
Tabel 2.3	Pemanfaatan Wilayah.....	39
Tabel 2.4	Tingkat Pendidikan	42
Tabel 2.5	Proporsi Jenis Pekerjaan.....	44
Tabel 3.1	Besaran Tambahan Penghasilan bagi Lurah dan Perangkat (Pamong Kalurahan).....	73
Tabel 3.2	Jadwal Jam Kerja bagi Lurah dan Perangkat (Pamong Kalurahan) selain Dukuh.....	75
Tabel 3.3	Jadwal Jam Kerja bagi Dukuh.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis Data Model Interaktif Milles dan Huberman	31
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kalurahan Panggungharjo	37
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk	41
Gambar 2.3	Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan....	41
Gambar 2.4	Grafik Proporsi Penduduk Berdasarkan Pendidikan	42
Gambar 2.5	Grafik Proporsi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan..	43
Gambar 2.6	Pemerintah Kalurahan Panggungharjo	49
Gambar 3.1	Penerima Bapel JPS Program Pendidikan	63
Gambar 3.2	Penerima Bapel JPS Program Kesehatan bagi Lansia.....	63
Gambar 3.3	Alur Proses Penyelesaian Kasus Hukum melalui LMD.....	65
Gambar 3.4	Mitigasi Dampak Ekonomi.....	67
Gambar 3.5	Model Bisnis Pasardesa.id.....	69
Gambar 3.6	Tampilan bantultanggung.com pada Layar <i>Handphone</i>	70
Gambar 3.7	Perangkat Kalurahan menerima Warta Dedikasi	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian Dari STPMD “APMD”
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Desa Panggungharjo
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Peraturan di Kalurahan Panggungharjo

INTISARI

Keberadaan Birokrasi sangatlah penting bagi jalannya roda pemerintahan, tidak terkecuali bagi pemerintahan di tingkat desa. Namun pada kenyataannya masih banyak kinerja birokrasi di tingkat pemerintahan desa yang belum sesuai harapan. Apabila kinerja birokrasi masih buruk maka bagaimana mungkin pemerintah kalurahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanah regulasi dan juga harapan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran yang dilakukan oleh Lurah Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam melakukan Reformasi Birokrasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggunharjo bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat kepada Kalurahan Panggunharjo mengingat birokrasi kalurahan yang terkesan lamban, korup dan bias kepentingan elit. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi tersebut maka berbagai upaya yang dilaksanakan yakni memperluas pelayanan publik dalam rangka mengubah relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, Pelayanan Administrasi Publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membangun kultur baru birokrasi dengan memberikan *reward and punishment*, keterbukan informasi Publik serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat Kalurahan.

Adapun hambatan yang dialami dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yakni disiplin kerja yang rendah, pola pikir perangkat kalurahan yang harus dilayani serta kebijakan reformasi birokrasi yang belum didukung regulasi. Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggunharjo berimplikasi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kinerja Pemerintah Kalurahan Panggunharjo sehingga Pemerintah Kalurahan Panggunharjo mendapatkan banyak penghargaan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pemerintah Desa, Panggunharjo.

ABSTRACT

The existence of the bureaucracy is very important for the running of the wheels of government, not least for the government at the village level. However, in reality there are still many bureaucratic performances at the village government level that have not lived up to expectations. If the performance of the bureaucracy is still bad, then how is it possible for the village government to carry out its duties and functions properly in accordance with the mandate of the regulations and also the hope to create community welfare. This study examines the role played by the Lurah Panggungharjo, Sewon District, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region, in carrying out Bureaucratic Reform.

This type of research is field research. The research specifications used in this research are descriptive. The research location in this research is the Panggungharjo Village Government, Sewon District, Bantul Regency. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques using observation, interviews, literature study and documentation. The data analysis method of this research is descriptive qualitative analysis.

The results showed that the Bureaucratic Reform in Panggungharjo Village aims to restore public confidence in Panggungharjo Village considering the sluggish, corrupt and biased interests of the elite. To realize the Bureaucratic Reform, various efforts were carried out, namely expanding public services in order to change the relationship between the village government and the community, Public Administration Services through One Stop Integrated Services, building a new culture of bureaucracy by providing rewards and punishments, openness of information Public and improve the quality of Human Resources (HR) of Kalurahan apparatus.

The obstacles experienced in implementing Bureaucratic Reform are low work discipline, the mindset of the village apparatus that must be served and bureaucratic reform policies that have not been supported by regulations. Bureaucratic reform in Panggungharjo Village has implications for increasing community participation in the development process, increasing the quality of public services, and increasing the performance of the Panggungharjo Village Government so that the Panggungharjo Village Government has received many awards both from within and outside the country.

Keywords: *Bureaucratic Reform, Village Government, Panggungharjo.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Birokrasi sangatlah penting bagi jalannya roda pemerintahan, tidak terkecuali bagi pemerintahan di tingkat kalurahan. Namun pada kenyataannya masih banyak kinerja birokrasi di tingkat pemerintahan kalurahan yang belum sesuai harapan. Misalnya, etos kerja yang rendah yang ditandai dengan tingkat kehadiran yang rendah tidak sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Kondisi ini diperburuk dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga kurang mumpuni, misalnya belum memahami regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kalurahan secara memadai sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dengan kondisi birokrasi yang problematik tersebut menjadikan gerak langkah birokrasi menjadi lamban. Apabila kinerja birokrasi seperti gambaran tersebut tidak diubah maka bagaimana mungkin pemerintah kalurahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanah regulasi dan juga harapan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, kerana birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan

pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak (Sinambela, 2016:53). Sementara Rourke (1978), dalam Azhari (2011:59) mengungkapkan bahwa birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dan dijalankan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian-bagian lainnya, oleh orang-orang yang telah dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Perubahan atau perbaikan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada *mindset* dan *culturset* pegawai. Karena itu, reformasi birokrasi juga tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tapi mengubah pola pikir (*mind set*) dan pola budaya (*cultural set*) birokrasi untuk berbagi peran dalam tata kelola pemerintahan.

Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat. Dalam kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Pada tataran tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi (Pamungkas dkk, 2019).

Salah satu agenda utama dan pertama yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakatnya, adalah perubahan perilaku aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan. Paradigma perilaku birokrasi harus diubah dari yang lebih condong sebagai abdi negara ketimbang abdi masyarakat diubah menjadi lebih mengutamakan peranan sebagai abdi masyarakat ketimbang abdi negara. Pada hakekatnya, jika aparatur birokrasi sudah melaksanakan tugasnya dengan

sepenuh hati maka sesungguhnya mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai abdi masyarakat maupun sebagai abdi negara. Dengan perilaku aparatur birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, maka diharapkan dapat melahirkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka reformasi birokrasi menjadi urgen bukan hanya karena adanya dukungan legalitas formal tetapi keberadaannya didukung dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Mustafa (2014:153), jika dikaitkan dengan reformasi birokrasi maka tujuan reformasi birokrasi tidak lain adalah hasil yang diinginkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (*public trust bulding*) terhadap birokrasi agar dapat menjadi baik. Sedangkan menurut Dwiyanto (2012:223), menyatakan bahwa reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik diarahkan menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat pengguna jasa.

Namun kondisi birokrasi di kalurahan belumlah sesuai dengan yang diharapkan, demikian juga yang terjadi di Kalurahan Panggungharjo. Menurut Wahyudi Anggoro Hadi (2020 : 50) Kultur birokrasi pemerintahan kalurahan yang lekat dengan citra buruk, lamban, korup, bias kepentingan elite Kalurahan, dan tidak transparan harus dihilangkan. Citra yang melekat ini tidak semata-mata kesalahan aparatur pemerintah kalurahan. Ada dua penyebab

mendasar yang berkaitan dengan praktik marginalisasi kalurahan sejak zaman Orde Baru. Pertama, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 kalurahan tidak pernah diurus oleh negara dan tidak pernah dipandang sebagai entitas politik. Akibatnya perangkat kalurahan tidak pernah dilatih untuk menjalankan sistem pelayanan publik yang profesional. Penyebab kedua, dalam sistem pemerintahan kalurahan tidak dikenal jenjang karier. Perangkat kalurahanpun tidak menemukan manfaat secara langsung dari peningkatan kariernya.

Adapun, penelitian terdahulu dengan topik yang serupa adalah sebagai berikut:

Judul Penelitian	Nama Peneliti/Tahun	Hasil Penelitian Terdahulu
Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi Dan Tata Laksana Di Kemetrian Kelautan dan Perikanan	Sandy Ardiyansyah Putra (2015)	Bahwa Menemukan sampai dengan awal tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mencapai target dari area perubahan yang dicanangkan. Khususnya pada area perubahan organisasi dan tata laksana. Pada tahun 2014 didapatkan nilai 2,82 dari maksimal 6,00 untuk program penataan dan penguatan organisasi dan nilai 3,63 dari maksimal 5,00 untuk program penataan tata laksana. Hasil penelitian menunjukkan reformasi birokrasi bidang organisasi dan tata laksana di Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa masalah, diantaranya tugas pokok dan fungsi mengalami tumpang tindih baik internal maupun eksternal organisasi, dan terdapat perbedaan kepentingan antar aktor implementasi dan sumber daya anggaran yang tidak mencukupi selama pelaksanaan program. maka diperlukan beberapa langkah untuk

		<p>percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan design struktur dengan mengacu pada kajian akademis dan praktis salah satunya dengan menggunakan instrumen Analisa Beban Kerja 2) Menerapkan prinsip Good Governance pada penataan tata laksana dan 3) Melakukan Quick Wins terhadap SOP yang bersifat pelayanan publik.
Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi Di Kabupaten Pekalongan	Dyah Lituhayu (2015)	<p>Menemukan Fenomena yang diamati antara lain tumpang tindih, right sizing, efisiensi dan efektifitas organisasi, kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan pengembangan pegawai. Pada prinsipnya untuk bagian organisasi ini sudah melakukan reformasi birokrasi dengan pemahaman bekerja seefisien dan seefektif mungkin dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi bidang organisasi sudah dapat dikatakan baik terutama yang berhubungan dengan Tupoksi; sudah tidak terjadi tumpang tindih antara organisasi. Kalaupun terjadi tumpang tindih adalah bersifat individual dan ini hanya bersifat insidental.</p> <p>Berkaitan dengan right sizing pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, namun demikian ada pula karena pembentukan badan/ organisasi itu berdasarkan perintah pusat. Ketidakmampuan menghapus atau meniadakan badan yang dianggap tidak efisien itu juga berkaitan dengan regulasi yang ada. Daerah atau kabupaten dalam hal-hal tertentu tidak mungkin menyalahi regulasi dari pusat. Kendala lain apabila kita melakukan perampangan suatu kantor badan atau dinas, tidak semudah yang dibayangkan. Sebab hal ini akan menyangkut pejabat-pejabat yang ada</p>

		di bagian tersebut, ini tentu harus dipertimbangkan apabila akan menambah sekaligus menggabungkan ataupun meniadakan kantor badan maupun dinas.
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik	M.Fachri Adnan (2013)	Menemukan Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di pemerintah daerah. Ada beberapa masalah yang dihadapi birokrasi pemerintah daerah sehingga birokrasi belum mampu meningkatkan pelayanan publik secara maksimal, diantaranya; 1) Struktur organisasi dan tata kerja yang tidak efisien, 2) partisipasi masyarakat masih rendah, 3) transparansi tidak berjalan, 4) mekanisme kerja dan tugas-tugas yang tumpang tindih 5) politisasi pegawai negeri sipil masih gejala, 6) sistem karir tidak healthy, 7) aparat birokrasi tidak bersedia respon tuntutan perubahan. Sehingga, untuk memecahkan masalah birokrasi pemerintah daerah, harus dilakukan reformasi yang mengacu pada kebijakan reformasi birokrasi yang dituangkan Grand Design reformasi birokrasi yang ditetapkan pada tingkat nasional. Dalam upaya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pemerintah daerah harus memiliki standar pelayanan minimum yang jelas dan terukur, dan dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat. Masyarakat juga dapat dapat menilai kualitas yang diberikan dengan menggunakan indek kepuasan masyarakat.

Penelitian diatas mengambil lokus pada level pemerintahan supra kalurahan baik di tingkat pemerintah pusat (Kementerian) maupun di tingkat

pemerintahan daerah. Sedangkan lokus pada penelitian ini adalah level pemerintahan yang paling rendah yakni pemerintah kalurahan sehingga permasalahan dan tantangan yang dihadapi tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga dengan demikian, permasalahan maupun tantangan dalam melakukan upaya reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan kalurahan menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian Peran Lurah dalam Melakukan Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggungharjo, Fokus penelitian meliputi:

1. Implementasi reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo.
2. Kendala yang dihadapi dalam melakukan reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo.
3. Capaian reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo?
3. Bagaimana capaian reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi reformasi birokrasi di Kalurahan Panggungharjo.

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kalurahan Panggunharjo.
3. Untuk mengidentifikasi capaian reformasi birokrasi di Kalurahan Panggunharjo.

E. Manfaat Hasil Penelitian:

1. Praktis:

Menjadi bahan referensi dan evaluasi bagi upaya pembenahan aparat pemerintah kalurahan/desa bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan/Desa dan masyarakat pada umumnya mengenai upaya Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Kalurahan.

2. Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai reformasi birokrasi di tingkat pemerintah Kalurahan/Desa.
- b. Memperkaya khasanah hasil penelitian dalam ilmu pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Konseptual

1. Reformasi Birokrasi

Secara teoritis, reformasi adalah perubahan dimana kedalamannya terbatas sedangkan keluasan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat (Sinambela, 2016:25). Reformasi bisa diartikan sebagai sebuah agenda perubahan secara bertahap melalui berbagai macam strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai hasil dan target yang diinginkan demi adanya

perbaikan yang lebih menjanjikan, dan reformasi secara istilah perubahan dari yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik atau reformasi sebagai bagian dari evolusi yang terus menerus dilakukan seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan masa depan yang membutuhkan perbaikan sebagai tolak ukur dalam pencapaian tingkat kepuasan atau keberhasilan (Haning, 2015;147-148).

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik): sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Sedarmayanti, 2013:67).

Reformasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan pemerintah yang baik pada suatu masa, dapat menjadi tidak sesuai lagi karena perkembangan zaman (Pandji Santosa, 2012:117).

Adapun Birokrasi menurut kamus umum bahasa indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Ditinjau dari segi bahasa, birokrasi berasal dari bahasa yunani, *kretein* yang berarti mengatur. Dalam bahasa Prancis birokrasi disamakan dengan kata bureau yang berarti kantor. 'Biro' sendiri secara leksikal (*bureau*) dalam kamus mempunyai arti sebagai biro, kantor, atau departemen pemerintah.

‘Birokrasi’ mempunyai arti pemerintahan dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk.

Birokrasi memiliki sejumlah makna, di antaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan *officialism*, badan eksekutif pemerintah (*the executive organs of government*), dan keseluruhan pejabat publik (*public officials*), baik itu pejabat tinggi ataupun rendah (Albrow, 1989:116-117). Diantara ketiga makna tersebut, karakteristik umum yang melekat pada birokrasi adalah keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintah. Makna birokrasi sebagai lembaga pemerintah muncul karena lembaga pemerintah pada umumnya selalu berbentuk birokrasi.

Dalam konteks Indonesia, lembaga pemerintah pada umumnya memiliki hierarki yang panjang, prosedur dan standar operasi yang tertulis, spesialisasi yang rinci, dan pajabat karier yang menjadi karakteristik birokrasi. Karena kinerja birokrasi pemerintah pada umumnya cenderung buruk dan mengecewakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga pandangan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah cenderung negatif yang pada akhirnya menimbulkan stereotif yang negatif tentang konsep birokrasi.

Robbins (1994: 338) mengutip konsep birokrasi ideal dari Weber yang terdiri dari 7 elemen, sebagai berikut:

- a. Spesialisasi pekerjaan, yakni Pekerjaan-pekerjaan dilakukan dalam kesederhanaan, rutinitas dan mendefinisikan tugas dengan baik.

- b. Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang formal, dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi.
- c. Formalisasi yang tinggi, yaitu semua anggota organisasi diseleksi dalam basis kualifikasi yang didemonstrasikan dengan pelatihan, pendidikan atau latihan formal.
- d. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan, yaitu keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi teknis, kemampuan dan prestasi para calon
- e. Bersifat tidak pribadi (impersonalitas), yaitu sanksi-sanksi diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan dengan keperibadian individual dan preferensi pribadi para anggota.
- f. Jejak karier bagi para pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar karier dalam organisasi. Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karier tersebut, para pegawai mempunyai masa jabatan, artinya mereka akan dipertahankan meskipun mereka “kehabisan tenaga” atau jika kepandaiannya tidak terpakai lagi.
- g. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi, yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

Birokrasi menurut Weber merupakan sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif (Thoha, 2014;15). Konsep birokrasi Weberian berasumsi bahwa birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik. Ia berada di luar atau di atas aktor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain. Birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral, lebih mengutamakan kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan, sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan pelayanan terbaik kepadanya.

Reformasi birokrasi secara umum pada hakikatnya merupakan agenda penting dalam memperbaiki dan membenahi penyelenggaraan pemerintahan atau sistem administrasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur (Haning, 2015;151). Sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2013;71-72).

Pada pelaksanaan reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan serta merta begitu saja harus melalui beberapa strategi perubahan. Menurut Thoha (2014;109-111), strategi pembaharuan aparatur pemerintah harus komprehensif menyeluruh tidak sporadis dan parsialistik. Menurut Miftah Thoha, strategi pembaharuan aparatur pemerintah sebagai berikut :

a. Kelembagaan birokrasi pemerintah

Strategi pembaharuan yang dilakukan sebagai perubahan kelembagaan birokrasi pemerintah terdiri dari kultur dan struktur. Kultur merupakan perpaduan tata nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang diyakini kebenarannya untuk diperjuangkan. Adapun struktur merupakan kerangka yang di pergunakan sebagai tata aliran proses bagaimana kultur itu bisa diterapkan dan diwujudkan dalam suatu pemerintahan.

b. Sistem penataan birokrasi pemerintah

Strategi pembaharuan terhadap sistem penataan birokrasi pemerintah merupakan sistem yang dapat menunjang tercapainya sistem yang menciptakan aparatur yang menghargai ditegapkannya hukum, profesional, kompeten, dan akuntabel.

c. Sumber daya aparatur

Strategi pembaharuan sumber daya aparatur merupakan sumber daya manusia yang dibekali dengan pemberian pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Selain itu, kesejahteraan pegawai juga perlu di perhatikan.

Pemberdayaan organisasi merupakan konsekuensi untuk menanggapi perubahan, utamanya difokuskan pada sumber daya manusia sebagai pelaku utama perubahan. SDM tidak sekedar menjadi alat untuk mencapai tujuan melainkan sebagai *human capital* yang berharga. Oleh

karena itu, manajemen sumber daya manusia perlu mendapat perhatian terutama dalam upaya peningkatan kualitasnya.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi pemerintahan Kalurahan adalah segenap upaya sistematis yang dilakukan secara bertahap guna mewujudkan birokrasi di tingkat pemerintahan Kalurahan yang akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Guna memberikan arah pembangunan di Kalurahan Panggunghajo khususnya terkait reformasi birokrasi maka Pemerintah Kalurahan Panggunghajo menetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi dan Misi Kalurahan Panggungharjo terkait reformasi Birokrasi dalam penulisan ini terdapat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Panggungharjo Tahun 2013-2017 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Panggungharjo Tahun 2019-2024. Adapun Visi Kalurahan Panggungharjo, sebagai berikut:

“Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat Kalurahan Panggungharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan.”

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bersih dalam arti pemerintahan yang tulus ikhlas dan suci.

Transparan dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Bertanggungjawab dalam arti pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Panggunharjo yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Panggunharjo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berkesadaran lingkungan dalam menjadikan kelestarian lingkungan sebagai ruh atas segala kegiatan pembangunan.

Adapun misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Kalurahan Panggungharjo adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan.
- b. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.
- c. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipasif.
- e. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah.

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi maka misi yang relevan adalah mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan. Guna mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kalurahan Panggungharjo tujuan dan sasaran dari misi tersebut. Adapun tujuan dari misi tersebut yakni:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.

- b. Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi tersebut yakni:

- a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan desa serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa.
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan.
- e. Meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan.
- f. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Tata Kelola Pemerintah Kalurahan

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa, menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1).

Pengaturan terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Dalam regulasi tersebut, Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan
- c. Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas tiga urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi,

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pelaksana merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- e. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- f. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Idrus (2009:29) penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga

pemerintahan. Sedangkan spesifikasi penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menuliskan atau menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu atau pada kelompok tertentu dan pada saat tertentu. Dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dalam masyarakat (Soekanto, 1986: 7-9).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian secara langsung guna mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dengan demikian lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau organ yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian (Idrus, 2009:91). Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Lurah Panggungharjo.
- b. Perangkat Kalurahan Panggungharjo.
- c. Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo.
- d. Warga Kalurahan Panggungharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian lapangan secara langsung (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun secara langsung untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Tujuan penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soemitro, 1998: 92). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*). Tujuan penelitian kepustakaan dan dokumentasi dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung di lapangan dengan informan atau subjek penelitian.

- 1) Observasi

Idrus (2009: 101) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan terhadap objek penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu meneliti, mengadakan pengamatan pada obyek secara langsung untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti tanpa terlibat didalamnya.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai Reformasi Birokrasi di Kalurahan Panggunharjo.

Selain peneliti melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan pencatatan, dan pengambilan gambar dengan alat perekam gambar (foto) dengan tetap berpedoman pada ruang lingkup penelitian, sehingga semua situasi, kondisi, fenomena dan hal-hal lain yang menjadi obyek observasi dapat dicatat dan terekam dengan cermat. Tujuannya untuk mengetahui situasi dan kondisi serta fenomena di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak berdiri sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali dikombinasikan dengan metode wawancara. Tujuan terpenting adalah dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang faktual di lapangan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2007: 231). Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau informasi dari informan secara langsung dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang objek penelitian, situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan di mana hal tersebut tidak dapat ditemukan melalui observasi.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan informan menggunakan *interview guide* (pedoman

wawancara). Cara ini memiliki keunggulan dalam hal kebebasan dari informan untuk memberikan jawaban yang ditanyakan oleh peneliti, juga peneliti bisa memberikan batasan yang jelas mengenai pokok masalah yang harus digali dari informan.

Wawancara dilakukan di tempat informan berada. Waktu wawancara dilakukan atas kesepakatan antara peneliti dengan informan. Situasi dipilih pada saat informan benar-benar siap dan cukup waktu untuk memberikan keterangan dengan baik. Proses wawancara dilakukan satu-persatu. Agar wawancara berlangsung dengan sistematis dan tidak menyimpang dari maksud wawancara, peneliti melengkapi diri dengan *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam pelaksanaannya di lapangan peneliti juga tidak secara kaku dalam mengajukan pertanyaan, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, termasuk dalam hal ini adalah pilihan bahasa, istilah, dan cara bertanya.

b. Teknik pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*). Study kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami serta mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, yaitu:

- 1) Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat, daerah dan Kalurahan yang relevan dengan penelitian.
- 2) Paper/artikel yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari buku maupun internet.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif. Deskriptif merupakan hasil penelitian yang berisi data dari penelitian lapangan penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau fenomena, gejala ataupun sifat dari objek yang diteliti, selanjutnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya data yang diperoleh lewat penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif. Secara kualitatif maksudnya adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi, dikelompokkan secara sistematis, dikaji dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti (Amirin: 1986: 98-99).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubberman. Model interaktif ini terdiri dari 4 (empat) yaitu: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Menurut Miles dan Hubberman (2009: 148) keempat tahap tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum.

Tahapan-tahapan atau proses analisis data menurut Miles dan Hubberman (2009: 18) yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Miles Huberman menyatakan bahwa dari pengumpulan data permulaan, seorang penganalisis kualitatif mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proposisi (Miles dan Huberman, 2009: 17).

Proses pengumpulan data sebagaimana diungkapkan di muka harus melibatkan sisi aktor (informan/responden), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai alat pengumpul data (konsep *human instrument*), peneliti harus pandai-pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, dan bergaul di tengah-tengah masyarakat yang menjadi informan penelitian (Miles dan Huberman, 2009: 18).

2. Tahap Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita

apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis (Miles dan Hubberman, 2009: 19).

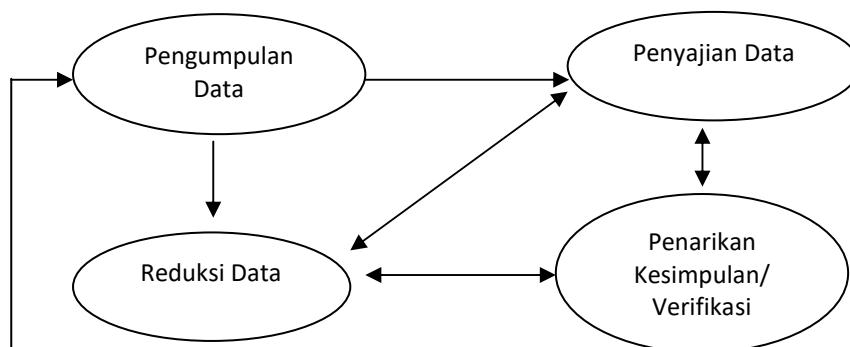
3. Display Data/ Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah hal aktifitas-aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif (Miles dan Hubberman, 2009: 19).

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dimaknai sebagai penarikan data yang telah ditampilkan. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, ukuran, hubungan, persamaan, akibat, dan hal-hal yang sering timbul, kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Analisis Data Model Interaktif Milles dan Huberman (1992: 20)



Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasakan masih kurang mantap, maka dilakukan penggalian data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan kesimpulan dirasakan sudah cukup untuk menggambarkan dan menjawab fokus penelitian Milles dan Hubberman (1992: 20). Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan itu disajikan dalam bentuk uraian, dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN PANGGUNGHARJO

A. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Panggungharjo merupakan gabungan dari tiga kalurahan yakni Kalurahan Cabeyan, Kalurahan Prancak dan Kalurahan Krapyak. Keberadaan Kalurahan Panggungharjo tidak bisa dipisahkan dari keberadaan “*Panggung Krapyak*” atau oleh masyarakat sekitar disebut sebagai “*Kandang Menjangan*”, yang berada di Pedukuhan Krapyak Kulon, Kalurahan Panggungharjo. *Panggung Krapyak* merupakan salah satu elemen dari “sumbu imajiner” yang membelah Kota Yogyakarta, yaitu garis Gunung Merapi – Tugu Pal Putih – Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat – *Panggung Krapyak* dan Parangkusumo yang berada di pantai selatan.

Kalurahan Panggungharjo dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP tertanggal 23 September 1947. Dengan keputusan dewan pemerintah tersebut pula, Hardjo Sumarto, diangkat sebagai Lurah Kalurahan Panggungharjo yang pertama. Berdasarkan fakta dan bukti sejarah, akar budaya di Kalurahan Panggungharjo tumbuh dan berkembang berhubungan erat dan dipengaruhi oleh komunitas dan intervensi budaya yang berkembang pada masanya, yaitu:

1. Pada abad ke 9-10 Kalurahan Panggungharjo adalah merupakan kawasan agraris, hal ini dibuktikan dengan adanya Situs Yoni Karang Gede di Pedukuhan Ngireng-Ireng. Sehingga dari budaya agraris ini muncul

budaya seperti : Gejok Lesung, ThektheK/Kothek-an, Upacara Merti Dusun, Upacara Wiwitan, Tingkep Tandur, dan budaya-budaya lain yang sifatnya adalah merupakan pengormatan kepada alam yang telah menumbuhkan makanan sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia.

2. Pada abad ke 16 wilayah Krapyak Kulon dan Glugo merupakan kawasan wisata berburu (Pangeran Sedo Krapyak – 1910), sedangkan pada Abad ke 17 kawasan ini merupakan tempat olahraga memanah kijang/menjang dan sebagai tempat pertahanan (Sultan HB I – Panggung Krapyak 1760). Budaya yang berkembang karena pengaruh keberadaan Kraton Mataram sebagai pusat menumbuhkan budaya adiluhung seperti : Panembromo, Karawitan, Mocopat, Wayang, Ketoprak, Kerajinan Tatah Sungging, Kerajinan Blangkon, Kerajinan Tenun Lurik, Batik, Industri Gamelan, Tari-tarian Klasik, dan lain-lain.
3. Pada tahun 1911 di wilayah Krapyak Kulon didirikan Pondok Pesantren Al-Munawir, sehingga berkembang budaya seperti : Sholawatan, Dzibaan, Qosidah, Hadroh, Rodad, Marawis, dan juga budaya-budaya yang melekat pada kegiatan peribadatan seperti : Suran (peringatan 1 Muharram), Mauludan (peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW), Rejeban (peringatan Isro‘ Mi‘roj), Ruwahan/Nyadran (mengirim doa untuk leluhur menjelang Bulan Ramadhan), Selikuran (Nuzulul Qur‘an), dan lain-lain.
4. Sekitar tahun 1900-1930 berkembanglah budaya karena adanya kebutuhan bersosialisasi di masyarakat, antara lain berkembang bermacam-macam

dolanan anak seperti : Egrang, Gobak Sodor, Benthik, Neker-an, Umbul, Ulur/layangan, Wil-wo, dan lain-lain. Bahkan di kampung Pandes berkembang sebuah komunitas “Kampung Dolanan” yang memproduksi permainan anak *tempo doeloe*, seperti : Othok-Othok, Kitiran, Angkrek, Keseran, Wayang Kertas, dan lain-lain

5. Pada tahun 1980 di Kalurahan Panggungharjo yang merupakan wilayah sub-urban mulai berkembang budaya modern perkotaan dan banyak memengaruhi generasi muda, sehingga berkembanglah kesenian band, drumband, karnaval takbiran, tari-tarian modern, campur sari, outbond, playstation/game rental, dan lain-lain.

B. Wilayah

Kalurahan Panggungharjo merupakan salah satu Kalurahan di Kabupaten Bantul yang secara langsung berbatasan dengan kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota D.I. Yogyakarta. Secara lebih lengkap batas-batas Kalurahan Panggungharjo adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kota Yogyakarta

Sebelah timur : Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon

Sebelah Selatan : Kalurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon

Sebelah Barat : Kalurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon dan
Kalurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan Yogyakarta, Kalurahan Panggungharjo merupakan kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang ini juga berarti merupakan kawasan

strategis ekonomi. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan perkembangan penggunaan lahan dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pola penggunaan lahan di Kalurahan Panggungharjo mengalami perubahan cukup signifikan terutama pada lahan jenis tanah sawah yang mengalami perubahan fungsi menjadi pemukiman dan kegiatan bisnis dengan laju sekitar 2% per tahun. Ditinjau dari aspek pertanian, tingginya laju perubahan lahan sawah menjadi tanah kering ini perlu dikendalikan agar luasan lahan pertanian yang masih ada tetap mampu mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pembagian wilayah Kalurahan Panggungharjo berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

1. Kawasan Pertanian (Kring Selatan)

Peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian meliputi Pedukuhan Garon, Cabeyan, Ngireng Ireng, Geneng dan Jaranan. Kawasan ini merupakan penyangga produksi padi untuk Kalurahan Panggungharjo.

2. Kawasan Pusat Pemerintahan (Kring Tengah)

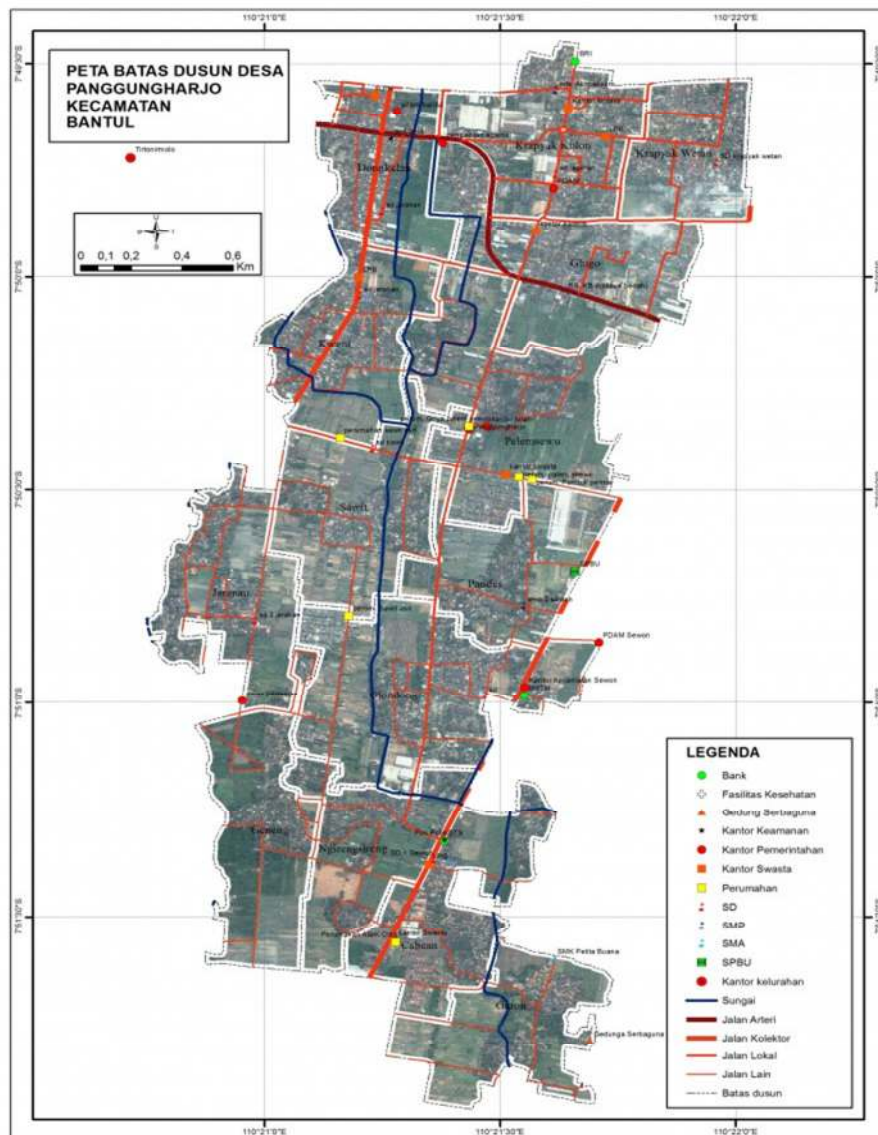
Dimana Balai Kalurahan Panggungharjo berada dan merupakan pusat Pemerintahan Kalurahan meliputi Pedukuhan Pelemsewu, Kweni, Sawit, Glondong dan Pedukuhan Pandes.

3. Kawasan Aglomerasi Perkotaan (Kring Utara)

Yang sering disebut kring utara (sebelah utara ring road) telah berkembang menjadi aglomerasi perkotaan yang disebabkan alih fungsi tanah persawahan ke pemukiman cukup tinggi meliputi Pedukuhan

Krapyak Wetan, Krapyak Kulon, Dongkelan dan Pedukuhan Glugo. Secara administratif Kalurahan Panggungharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 560.966,5 Ha. Adapun pedukuhan yang berada di Kalurahan Panggungharjo berikut jumlah RT di masing-masing padukuhan dan luas wilayah untuk setiap pedukuhan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kalurahan Panggungharjo



Secara administratif Kalurahan Panggungharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 560,966,5 Ha. Tabel di bawah ini berisi nama pedukuhan yang berada di Kalurahan Panggungharjo berikut jumlah RT di masing-masing padukuhan dan luas wilayah untuk setiap pedukuhan.

Table 2.1
Nama Padukuhan Beserta Jumlah RT dan Luas Wilayah

NO	PEDUKUHAN	RT	LUAS (Ha)	%
1	Krapyak Wetan	12	28.0315	5,00
2	Krapyak Kulon	12	38.5750	6,88
3	Dongkelan	10	30.1960	5,38
4	Glugo	12	44.8670	8,00
5	Kweni	8	42,5905	7,59
6	Pelemsewu	10	57.9120	10,32
7	Sawit	5	44.8185	7,99
8	Pandes	6	29.3520	5,23
9	Glondong	8	55.9820	9,98
10	Jaranan	6	41.1975	7,34
11	Geneng	7	42.7825	7,63
12	Ngireng-ireng	7	32.6845	5,83
13	Cabeyan	9	34.9995	6,24
14	Garon	7	36.9775	6,59
	Jumlah	119	560.9660	100,0

C. Kondisi Geografis

Data detail tentang kondisi geografis Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Table 2.2
Kondisi Geografis Kalurahan Panggunharjo

Ketinggian Tanah dari permukaan laut	:	45 Mdpl
Curah Hujan	:	2.233 mm/tahun
Topografi	:	Dataran Rendah
Suhu udara rata-rata	:	28° C
Jarak dari Pusat Kecamatan	:	2 Km
Jarak dari Ibukota Kabupaten	:	8 Km
Jarak dari Ibukota Provinsi	:	7 Km
Jarak dari Ibukota Negara	:	500 Km

Pemanfaatan wilayah Kalurahan Panggunharjo yang secara keseluruhan seluas 560.966,5 Ha dapat dilihat dalam table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Pemanfaatan Wilayah

A.	Berdasarkan Penggunaan	:		
	1. Industri	:	11.850 Ha	
	2. Pertokoan / Perdagangan	:	9.250 Ha	
	3. Perkantoran	:	1.565 Ha	
	4. Pasar Kalurahan	:	-	
	5. Tanah Wakaf	:	5.790,5	
	6. Tanah Sawah	:	a. Irigasi teknis	: -
			b. Irigasi setengah teknis	: 281.968 Ha

			c. Irigasi sederhana	: -
			d. Irigasi tadah hujan	: -
			e. Sawah pasang surut	: -
	7. Tanah Kering	:	a. Pekarangan	: 250.022,5 Ha
			b. Perladangan	: -
			c. Tegalan	: -
			d. Perkebunan Negara	: -
			e. Perkebunan swasta	: -
			f. Perkebunan rakyat	: -
			g. Tempat rekreasi	: -
B.	Berdasarkan Peruntukan	:		
	1. Jalan	:	24.033,1 Ha	
	2. Sawah dan lading	:	281.968 Ha	
	3. Bangunan umum	:	-	
	4. Empang	:	-	
	5. Pemukiman / Perumahan	:	240.904 Ha	
	6. Jalur hijau	:	-	
	7. Pekuburan	:	7.920 Ha	
	8. Lain-lain (sungai dan parit)	:	6.140,9 Ha	

D. Kependudukan

Berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2018, jumlah penduduk Kalurahan Panggunharjo sebanyak 28.141 jiwa, terdiri dari

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan M. Fachri, 2013. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik*. Jurnal Humanus. Vol. XII, No.2
- Albrow, Martin, 1989. *Birokrasi*. PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Amirin, Tatang. M. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*. Rajawali, Bandung.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia Dan Malaysia*. Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.
- Bayo, Longgina Novadona dan Purwo Santoso. 2019. *Breaking the Chains of Transactionalism: A Village Election without Money Politics in Panggungharjo*. PCD Journal Vol. VII, No. 2
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan: Edisi Revisi*. Alfabeta, Bandung
- Dwiyanto Agus, dkk, 2012. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadi, Wahyudi Anggoro. 2020. *Reformasi Birokrasi, Merumuskan Tata Birokrasi yang Kompatibel..* Yayasan Sanggar Inovasi Kalurahan, Yogyakarta.
- Hasyim, Djamil. 2016. *Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kampung Paray Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor*. Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI
- Heryana, Heri. 2014. *Keteladanan Kepemimpinan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur*. Jurnal Inspirasi Volume 5, No.1
- Idrus, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga, Jakarta.
- Kusmayadi, Edi dan Taufik Nurohman. 2011. *Reformasi Birokrasi di Tingkat Kalurahan (Studi Komparasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Kalurahan Sukakarta dan Kalurahan Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya)*. Jurnal Aliansi Vol. 3 No. 2.
- Lituhayu, Dyah. 2015. *Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi Di Kabupaten Pekalongan*. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 14, No. 2

- Milles, Matthew B dan Michael Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press, Jakarta.
- Mustafa Delly, 2014. *Birokrasi Pemerintahan: Edisi Revisi*. Alfabeta, Bandung.
- Pamungkas, W.S.B., Wibowo A.A.S, Yuniati, A. *Reformasi Birokrasi Pada Administrasi Publik*. Jurnal STIAMI. Vol. 2, No.1
- Putra, Sandy Ardiyansyah. 2015. *Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi dan Tata Laksana di Kementerian Kelautan dan Perikanan*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4, No. 1.
- Robbins, Stephen P, 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Kalurahanin & Aplikasi Edisi 3*. Arcan, Jakarta.
- Saefulrahman, Iyep. 2015. *Kepemimpinan, Modal Sosial, Dan Pembangunan Kalurahan (Kasus Keberhasilan Pembangunan Di Kalurahan Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut)*. Jurnal CosmoGov. Vol.1 No.1.
- Santosa, Pandji, 2012. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governace*. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Pemerintahan Yang Baik*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2016. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar* . RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Metode dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofyan, Aulia, Muhammad Adam dan M. Shabri Abd. Madjid. 2015. *Pengaruh Keteladanan Kepemimpinan dan Penerapan Peraturan Terhadap Disiplin dan Dampaknya Pada Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya*. Jurnal Manajemen Pasca Universitas Syah Kuala. Vol. 4, No. 3.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suryani, Dewi Amanatun. 2019. *Peran Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Bantul dalam Mewujudkan Good Governance melalui Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan*. *Journal of Public Administration and Local Governance*. Vol.3 (1)
- Thahir, Haning Mohamad. 2015. *Reformasi Birokrasi: Kalurahanin Organisasi Yang Mendukung Pelayanan Publik Di Indonesia*. Ilmu Giri, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi: Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Kencana, Jakarta.
- Tjahjoko, Guno Tri. (2019). *Demokrasi Kalurahan Tanpa Politik Uang*. *Jurnal Pemerintahan Daerah dan Kalurahan Indonesia*. Vol. 1, No. 1
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Wuryantono, Theodorus dan Ruswahyuningsih. 2019. *Masyarakat BerKalurahan: Realita atau Utopia ? Penelitian Evaluasi Tentang Partisipasi Masyarakat Kalurahan Pasca Implementasi Undang-Undang Kalurahan*. STPMD APMD Repository

Website

- Novidwyanto, Kelik. Wahyudi Anggoro Hadi, Pemimpin Muda yang Lahir dari Kalurahan. <https://www.brilio.net/creator/wahyudi-anggoro-hadi-pemimpin-muda-yang-lahir-dari-Kalurahan-b27349.html>. Diunduh tanggal 3 September 2021.
- <https://www.panggungharjo.Kalurahan.id/prestasi/> diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 19.37
- [https://www.panggungharjo.Kalurahan.id/BUM Kalurahan/](https://www.panggungharjo.Kalurahan.id/BUM%20Kalurahan/) diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 09.24

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Kementerian Dalam Negeri RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316.

Kementerian Dalam Negeri RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.

Kementerian Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kalurahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2.

Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Peraturan Kalurahan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kalurahan. Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 1.

Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2020 Nomor 6.

Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2021 Nomor 4.

Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. Peraturan Lurah Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan Panggungharjo.

Pemerintah Kalurahan Panggunharjo. Peraturan Lurah Panggunharjo Nomor 9
Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Kalurahan
Panggunharjo.